

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dimana salah satu indikator suatu negara dikatakan negara berkembang adalah dengan melihat pendapatan per kapitanya. Tondaro mengatakan bahwa “Negara berkembang yaitu negara yang tingkat pendapatannya rendah (\leq \$1.025), menengah-bawah (\$1.026 - \$4.035), atau menengah-atas (\$4.036 - \$12.475)”¹. Pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2016 yaitu Rp 47,96 juta per kapita per tahun, atau senilai US\$ 3.605, 06 yang termasuk ke dalam menengah-bawah.²

Sri Budhi mengatakan bahwa:

“Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju ataupun negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran, perbedaannya negara berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan itu”³.

Berdasarkan pernyataan Sri Budhi di atas, dapat dikatakan bahwa pengangguran merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara di dunia, termasuk negara maju ataupun negara berkembang meskipun terdapat

¹ Michael P. Tondaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi kesebelas* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 47.

² Ardan Adhi Chandra, “Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi Rp 4796 Juta/tahun”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3414745/pendapatan-per-kapita-ri-naik-jadi-rp-4796-jutatahun> (di akses pada 2 Februari 2017 pukul 21.59).

³ Made Kembar Sri Budhi, “Mengelola Sumber Daya Manusia dalam Menyongsong Millenium Development Goals (MDGS)”, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Volume 1. No. 2 Agustus 2008. hal. 82-85.

perbedaan yaitu negara maju dapat memberikan tunjangan bagi mereka yang menganggur, sedangkan negara berkembang tidak. Demikian halnya dengan yang diungkapkan oleh Sukirno bahwa “Masalah pengangguran di negara-negara berkembang adalah jauh lebih rumit dan lebih serius kalau dibandingkan dengan yang dihadapi di negara-negara maju”.⁴

Djohanputro menjelaskan bahwa “Pengangguran atau *unemployment* adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya (menemukannya)”.⁵ Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pengangguran pun akan terus bertambah jika tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan bagi perekonomian.

Suatu negara manapun tidak menginginkan adanya pengangguran dalam perekonomian, karena selain berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat juga merupakan beban ekonomi negara yang harus ditanggung baik dari segi ekonomi maupun politik. Idealnya, tidak adanya pengangguran memang sangat diharapkan, akan tetapi pada kenyataannya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun selalu ada dan bertambah banyak, dan situasinya memang tidak dapat dihilangkan. Laily dan Pristyadi menjelaskan bahwa :

“Hal yang dapat dilakukan oleh negara adalah mengurangi tingkat pengangguran sampai pada tingkat yang moderat (*full employment*), yaitu dimana semua lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara (swasta dan pemerintah) terisi penuh oleh para pencari kerja atau angkatan kerja”.⁶

⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 481.

⁵ Bramantyo Djohanputro, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro* (Jakarta: PPM, 2008), hal. 70.

⁶ Nur Laily & Budiyono Pristyadi, *Teori Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2013), hal. 114.

Berdasarkan penjelasan Laily dan Pristyadi di atas, dapat diketahui bahwa yang dapat dilakukan oleh negara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan mengisi semua lapangan pekerjaan yang tersedia terisi penuh oleh pencari kerja. Djohanputro mengatakan bahwa “Secara umum, pengangguran maksimum 5% dari angkatan kerja sudah dianggap bagus, dan ekonomi sudah dianggap berada pada ekonomi penuh”.⁷

Pengangguran yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut ini akan disajikan data tabel perkembangan pengangguran dari tahun 2010-2014.

Tabel I.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2010-2014 dalam %

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2010	7,27
2011	7,22
2012	6,25
2013	6,02
2014	5,82

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka yang ada di Indonesia mengalami penurunan, yaitu secara berturut-turut 7,27%, 7,22%, 6,25%, 6,02% dan 5,82%. Meskipun tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan, pemerintah tidak boleh lengah dalam mengatasi pengangguran karena peranan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha terus menerus.

⁷ Djohanputro, *op. cit.*, hal. 76.

Provinsi Banten merupakan provinsi yang berada di pulau Jawa. Dari enam provinsi yang berada di pulau Jawa tentu saja keenam provinsi tersebut memiliki permasalahan di bidang ekonomi terutama yaitu pengangguran. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, tingkat pengangguran di Provinsi Banten adalah yang paling tinggi, yaitu sebesar 9,06, disusul oleh Provinsi Jawa Barat 8,56, DKI Jakarta 7,79, Jawa Tengah 5,14, Jawa Timur 4,39, dan provinsi dengan tingkat pengangguran terendah adalah DI Yogyakarta 4,07. Seperti yang diungkapkan oleh pelaksana tugas Sekretaris Provinsi Banten Asmudji HW bahwa “Angka pengangguran di Banten masih tinggi, bahkan melebihi angka rata-rata nasional, pengangguran tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten”.⁸⁹

Tingkat pengangguran di Banten mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut ini disajikan data tabel tingkat pengangguran Banten selama 2010-2014.

Tabel I.2. Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2010-2014 dalam Jiwa

Tahun	Tingkat Pengangguran
2010	726.377
2011	680.564
2012	519.210
2013	509.286
2014	484.053

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pengangguran yang terjadi di Provinsi Banten. Jika dilihat, jumlah pengangguran yang terjadi di Banten

⁸ Sambas, “Angka Pengangguran di Banten Masih Tinggi”, (<http://www.antaraneews.com/berita/452281/angka-pengangguran-di-banten-masih-tinggi>), diakses pada 4 Februari 2017

mengalami penurunan dari tahun 2010-2014. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 Banten menempati posisi pertama untuk jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia. Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki pengangguran terbanyak diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia yaitu 9,65% pada tahun 2014.¹⁰ Meskipun pada tahun 2016 jumlah pengangguran di Provinsi Banten menurun, namun Provinsi Banten masih menduduki peringkat ke dua untuk jumlah pengangguran tertinggi diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia yaitu 8.43%.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pengangguran, diantaranya adalah tingkat upah. Danumiharja mengatakan bahwa “Upah adalah satu perwujudan riil dari pemberian kesejahteraan”.¹¹ Perbedaan tingkat upah antar wilayah di setiap provinsi di Indonesia dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan (PDB) wilayah tersebut. Semakin tinggi pendapatan (PDB) wilayah tersebut maka upah pada wilayah tersebut juga meningkat, begitupun sebaliknya jika pendapatan (PDB) wilayah tersebut masih rendah maka upah pada wilayah tersebut juga rendah. Selain itu, perbedaan tingkat upah juga disebabkan karena perbedaan kualitas yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kualitas dalam hal ini berarti ketrampilan dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Orang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang yang tidak menerima pendidikan tinggi ataupun tidak sama sekali.

¹⁰ BPS, “Pengangguran di Banten”, (<https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/981/BPS-Provinsi-Banten/Pengangguran-di-Banten>), diakses pada 4 Februari 2017 pukul 22.46.

¹¹ Mintarsih Danumiharja, *Profesi Tenaga Kependidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 219.

Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yaitu dengan menetapkan tingkat upah minimum provinsi Banten. Tingkat upah di Banten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut disajikan data tabel tingkat upah minimum provinsi Banten dari tahun 2010-2014.

Tabel 1.3. Tingkat Upah Minimum Regional di Provinsi Banten Tahun 2010-2014 dalam Rupiah

Tahun	Upah Minimum Regional (UMR)
2010	955.300
2011	1.000.000
2012	1.042.000
2013	1.170.000
2014	1.325.000

Sumber : BPS, data diolah

Menurut data di atas, kita dapat melihat kondisi kenaikan Upah Minimum Provinsi Banten dari tahun 2010-2014, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 955.300,00 hingga mencapai Rp 1.325.000,00 pada tahun 2014. Diharapkan dengan kenaikan upah tersebut akan mendorong tingkat produktivitas para pekerja sehingga akan mendorong perekonomian di Provinsi Banten menjadi lebih baik.

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan ketika terjadi kenaikan upah. Pertama adalah dari segi pihak pemberi kerja, bagi pemberi kerja jika terjadi kenaikan upah maka pihak pemberi kerja akan mengurangi faktor produksi yang lain agar tidak merugi, salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan tenaga kerja. Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan masalah yaitu bertambahnya jumlah pengangguran yang ada. Kedua, dari pihak penerima upah yaitu upah yang diterima oleh pekerja dapat meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan produksi di wilayah Banten. Namun, upah yang tidak kunjung naik

akan dapat mengurangi motivasi pencari kerja sehingga menunda untuk mendapatkan pekerjaan dengan menunggu kenaikan upah, hal ini dapat menambah jumlah pengangguran.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pengangguran adalah faktor pertumbuhan penduduk. Idealnya pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan produktivitas suatu negara, namun jika pertumbuhan penduduk tidak dimanfaatkan dengan bijak akan menimbulkan permasalahan kependudukan. Salah satunya adalah pengangguran. Widodo menjelaskan bahwa “Jumlah penduduk yang besar bagi suatu negara tidak otomatis akan menjadi modal pembangunan, bahkan dapat pula justru menjadi beban atau tanggungan penduduk lainnya”.¹² Seperti yang diungkapkan oleh Barthos bahwa “Jumlah penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia hendaklah dijadikan sebagai suatu keunggulan, bukan sebaliknya”.¹³ Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Provinsi Banten.

**Tabel I.4. Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2010-2014
dalam Jiwa**

Tahun	Jumlah Penduduk
2010	10.632.166
2011	11.005.518
2012	11.248.947
2013	11.452.491
2014	11.704.877

Sumber : BPS, data diolah

¹² Suseno Triyanto Widodo, *Indikator Ekonomi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 104.

¹³ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Makro)*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara), 1993, hal. 8.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Yaitu pada tahun 2013 11452491 jiwa dan kemudian pada tahun 2014 sebesar 11704877 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini harus dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh pemerintah Provinsi Banten agar tidak menimbulkan masalah kependudukan, terutama adalah masalah pengangguran. Hal inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk terus membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan Provinsi Banten agar dapat meminimalisasi atau mengatasi permasalahan yang akan ditimbulkan.

Jumlah penduduk yang terus bertambah di wilayah Provinsi Banten ini merupakan salah satu aspek dalam pembangunan yaitu tersedianya sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar tersebut dapat mendorong produktivitas di wilayah Provinsi Banten. Namun jika peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan jumlah lapangan pekerjaan maka dapat menimbulkan pengangguran, yang akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

Selain kedua faktor tersebut, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan memang penting untuk semua golongan masyarakat, baik untuk masyarakat golongan menengah kebawah ataupun masyarakat golongan atas karena semua berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap Warga negara berhak mendapat pendidikan. Seperti dikutip oleh berita Tangselpos:

“Menurut Ayat 4 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Banten hanya mencapai 3,69 persen dari total APBD sebesar Rp 8,95 triliun. Dengan kata lain, di Banten ini hanya menganggarkan Rp 135.600 persiswa pertahun”.¹⁴

Selain anggaran pendidikan di Provinsi Banten masih tergolong kecil, angka putus sekolah di Provinsi Banten juga meningkat, seperti yang dikutip oleh berita Republika berikut:

”Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tergolong kecil untuk Provinsi Banten, ada masalah lain terkait pendidikan di Provinsi Banten yaitu untuk jumlah persentase angka partisipasi murni (APM) pendidikan Tahun 2015, atau jumlah anak bersekolah tiap jenjang pendidikan di Banten mengalami penurunan. Untuk jenjang pendidikan SD mencapai 96,0 persen, pada jenjang SMP mengalami penurunan mencapai 79,9 persen dan terus mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SLTA hanya 50,5 persen. Selain itu, angka putus sekolah di Banten juga tinggi yaitu berdasarkan data dari sekitar 602 ribu jiwa penduduk usia sekolah menengah, sekitar 312 ribu anak tidak sekolah dan dari jumlah tersebut hanya sekitar 155 ribu yang sedang bekerja”.¹⁵

Hal ini selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang menyatakan bahwa “Pengangguran terbanyak adalah lulusan sekolah menengah atas, diikuti di posisi kedua lulusan diploma, dan lulusan universitas di urutan ketiga”.¹⁶

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan, angka pengangguran di Banten akan semakin bertambah jika pendidikan di Provinsi Banten tidak diperbaiki.

¹⁴ Yul, Kemdikbud Soroti Dunia Pendidikan Banten (<http://tangselpos.co.id/2016/06/29/kemendikbud-soroti-dunia-pendidikan-banten/>), diakses pada 12/7/17, pukul 06:37 WIB.

¹⁵ Taufik Rachman, “Angka Putus Sekolah di Banten Masih Tinggi”, (<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/13/03/20/mjyes3-angka-putus-sekolah-di-banten-masih-tinggi>) diakses pada 12/7/17, pukul 06:43 WIB.

¹⁶ Andika Wahyu, “Lulusan SMK di Banten Banyak Jadi Penganggur”, (<https://m.tempo.co/read/news/2015/05/08/058664501/lulusan-smk-di-banten-banyak-jadi-penganggur>) diakses pada 12/7/17.

Pemerintah Provinsi Banten harus memberikan perhatian khusus untuk pendidikan karena pendidikan merupakan investasi untuk masa depan. Hal ini untuk mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan karena pendidikan yang rendah.

Sejatinya pendidikan sangat diperlukan oleh semua masyarakat untuk menunjang kehidupannya terutama untuk masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan maka akan memberikan ketrampilan dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan saat memasuki dunia kerja. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan di bawahnya atau tidak sama sekali. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi jenjang pendidikan yang diambil oleh seseorang maka akan memberikan manfaat seperti ketrampilan dan kemampuan serta kualitas yang lebih mumpuni. Hal ini akan menjadikan masyarakat lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan.

Saat ini, dunia usaha sudah semakin berkembang, perusahaan akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk memperoleh sumber daya yang berkualitas, maka diperlukan suatu calon tenaga kerja yang mempunyai kualitas. Kualitas ini dapat diperoleh melalui pendidikan. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, bursa tenaga kerja lebih mengutamakan calon tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada yang lainnya, yang tentu saja mempunyai kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, calon-calon tenaga

kerja yang tidak memenuhi syarat akan terseleksi dan akhirnya menganggur. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yaitu bertambahnya pengangguran yang dikarenakan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Agar lebih jelasnya tentang kondisi pendidikan di Provinsi Banten berikut disajikan tabel yang memuat informasi pendidikan berdasarkan lulusan SMA dari tahun 2010-2014.

Tabel I.5. Tingkat Pendidikan (Lulusan SMA) 2010-2014 dalam Jiwa

Tahun	Tingkat Pendidikan
2010	135.066
2011	141.976
2012	149.972
2013	146.265
2014	149.485

Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan Tabel I.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah tingkat pendidikan (lulusan SMA) setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2013 sempat menurun. Namun, peningkatan tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Provinsi Banten merupakan provinsi yang dekat dengan ibukota, oleh karena itu seharusnya Provinsi Banten dapat mengikuti peningkatan lulusan sehingga tenaga kerja di Provinsi Banten dapat bersaing dengan wilayah lain.

Peningkatan jumlah lulusan pada tingkat pendidikan tertentu akan meningkatkan kualitas dan kemampuan seseorang, sehingga akan semakin tinggi peluang yang didapatkan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh.

Faktor lain yang dapat menyebabkan pengangguran yaitu rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam melihat keadaan ekonomi suatu wilayah. Dengan adanya pengangguran yang tinggi tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang dikutip pada berita Bantenku bahwa “Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2011-2014”.¹⁷ Berturut-turut adalah 6,38 persen, 6,15 persen, 5,86 persen, 5,86 persen dan tahun 2014 5,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten masih harus ditingkatkan dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan efektif.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan pengangguran bertambah, hal tersebut dikarenakan perekonomian yang lesu tidak menggairahkan bagi para produsen untuk memproduksi barang karena penerimaan yang didapatkan menjadi sedikit atau tidak menguntungkan. Kemudian yang terjadi adalah pengurangan faktor produksi yang salah satunya adalah dengan mengurangi tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran.

Pengangguran dapat di tekan oleh pemerintah dengan menggunakan kebijakan yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Namun jika kebijakan yang diambil gagal maka akan menimbulkan masalah yaitu dengan bertambahnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu diharapkan pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk mengurangi

¹⁷ Dhan, Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten Turun dalam 4 Tahun Terakhir (Bantenku. co.id/post/detail/laju-pertumbuhan-ekonomi-banten-turun-dalam-empat-tahun-terakhir) diakses pada 13/2/17

besarnya jumlah pengangguran yang ada sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan bahwa pengangguran disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Banten
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Provinsi Banten
3. Pengaruh upah minimum terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Banten
4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Provinsi Banten

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dan agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada masalah “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi peneliti maupun bagi pembaca terutama mengenai jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan upah minimum serta pengaruh antara tingkat jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya Provinsi Banten dalam menyusun kebijakan terutama mengenai kebijakan kependudukan, pendidikan, upah minimum serta pengangguran.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan edukasi bagi masyarakat khususnya tentang kependudukan, pendidikan, upah minimum serta pengangguran

c. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian tentang jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan upah minimum terhadap pengangguran.